

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-GOVERNMENT*
MELALUI APLIKASI SEMESTA DENGAN PENDEKATAN
MULTIPLE STREAMS/CRITICAL JUNCTURE
DI KABUPATEN OGAN ILIR**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Sains (M.Si)**

Pada

**Program Studi Magister Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**

**ADE KURNIAWAN
07012682327026**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-GOVERNMENT*
MELALUI APLIKASI SEMESTA DENGAN
PENDEKATAN *MULTIPLE STREAMS/CRITICAL*
JUNCTURE DI KABUPATEN OGAN ILIR

Nama Mahasiswa : ADE KURNIAWAN

NIM : 07012682327026

Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Bidang Kajian Utama : KEBIJAKAN PUBLIK

Menyetujui,



Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.
Pembimbing Pertama



Dr. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si.
Pembimbing Kedua

Mengetahui,

Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik



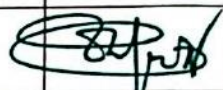


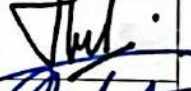


Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.
NIP. 19780512 100212 1 003



HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Tesis : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-GOVERNMENT*
MELALUI APLIKASI SEMESTA DENGAN
PENDEKATAN *MULTIPLE STREAMS/CRITICAL*
JUNCTURE DI KABUPATEN OGAN ILIR

Nama Mahasiswa : Ade Kurniawan
NIM : 07012682327026
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik
Tanggal Ujian : 7 Januari 2025

NO.	NAMA DOSEN	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.	Ketua	
2	Dr. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Wahyuningrat, M.Si	Anggota	
4	Prof. Dr. Sriati, M.S	Anggota	
5	Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA	Anggota	
6	Dr. Atrika Iriani, M.Si	Anggota	


Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 19660122 199003 1 004

Palembang, Januari 2025
Menyetujui,
Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik


Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.
NIP. 19780512 200212 1 003

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Kurniawan
NIM : 07012682327026
Tempat / Tanggal lahir : Palembang, 03 Oktober 1993
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik
Judul Tesis : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-GOVERNMENT*
MELALUI APLIKASI SEMESTA DENGAN
PENDEKATAN *MULTIPLE STREAMS/CRITICAL*
JUNCTURE DI KABUPATEN OGAN ILIR .

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 11 Januari 2025

Menyatakan,


Ade Kurniawan
NIM. 07012682327026

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Kurniawan
NIM : 07012682327026
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik. **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non exclusive Royalty - Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-GOVERNMENT* MELALUI APLIKASI SEMESTA DENGAN PENDEKATAN *MULTIPLE STREAMS/CRITICAL JUNCTURE* DI KABUPATEN OGAN ILIR”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Palembang
Pada Tanggal : 11 Januari 2025
Yang Menyatakan,



Ade Kurniawan
NIM. 07012682327026

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-GOVERNMENT* MELALUI APLIKASI SEMESTA DENGAN PENDEKATAN *MULTIPLE STREAMS/CRITICAL JUNCTURE* DI KABUPATEN OGAN ILIR

Karya tulis ilmiah berupa tesis, Desember 2024

Ade Kurniawan, dibimbing oleh Dr. Raniasa, S.IP., M.Si dan Dr. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si

xvii+200 halaman, 15 tabel, 12 gambar, 15 lampiran

Aplikasi SEMESTA merupakan salah satu inovasi digital yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan aplikasi SEMESTA menggunakan teori *Multiple Streams/Critical Juncture* dari Michael Howlett, yang mencakup empat aliran kebijakan: aliran masalah, kebijakan, politik, dan program. Pada aliran program, untuk analisis lebih mendalam peneliti menggunakan 12 indikator dari Apleni dan Smuts. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan *e-government* melalui aplikasi SEMESTA masih belum optimal. Berdasarkan analisis, aliran masalah dan aliran politik terlihat menjadi pendorong untuk diterapkannya kebijakan ini, sementara jika dilihat dari aliran kebijakan dan aliran program, implementasi kebijakan aplikasi SEMESTA menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan pendanaan, belum adanya regulasi khusus yang mengatur aplikasi SEMESTA, rendahnya tingkat kesadaran dan kemampuan teknologi pengguna, serta masalah infrastruktur jaringan dan keamanan data. Meskipun demikian, terdapat dukungan kuat dari manajemen puncak dan keterlibatan stakeholder yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi aplikasi ini. Oleh karena itu, direkomendasikan peningkatan alokasi anggaran, penguatan kerangka hukum, pelatihan pengguna, serta pengembangan infrastruktur dan fitur aplikasi SEMESTA.

Kata kunci: implementasi, aplikasi SEMESTA, *e-government*, *Multiple Streams/Critical Juncture*.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT POLICY THROUGH SEMESTA APPLICATION WITH MULTIPLE STREAMS/CRITICAL JUNCTURE APPROACH IN OGAN ILIR REGENCY

Scientific paper in the form of a thesis, Desember 2024

Ade Kurniawan, supervised by Dr. Raniasa, S.IP., M.Si dan Dr. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si

xvii+200 pages, 15 tables, 12 figures, 15 attachments

The SEMESTA application is one of the digital innovations implemented by the Ogan Ilir Regency Government. This study aims to analyze the SEMESTA application policy implementation process using Michael Howlett's Multiple Streams/Critical Juncture theory, which includes four policy streams: problem, policy, political, and program streams. In the program stream, for a more in-depth analysis, researchers used 12 indicators from Apleni and Smuts. The research method used is descriptive qualitative with in-depth interview techniques, observation, and documentation studies. The results showed that the implementation process of e-government policy through the SEMESTA application was still not optimal. Based on the analysis, the problem flow and political flow appear to be the drivers for the implementation of this policy, while when viewed from the policy flow and program flow, the implementation of the SEMESTA application policy faces several obstacles, such as limited funding, the absence of specific regulations governing the SEMESTA application, the low level of awareness and technological capabilities of users, as well as network infrastructure and data security issues. Nevertheless, there is strong support from top management and stakeholder involvement which are supporting factors in the implementation of this application. Therefore, it is recommended to increase budget allocation, strengthen the legal framework, train users, and develop infrastructure and features of the SEMESTA application.

Keywords: implementation, SEMESTA application, e-government, Multiple Streams/Critical Juncture

RINGKASAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-GOVERNMENT* MELALUI APLIKASI SEMESTA DENGAN PENDEKATAN *MULTIPLE STREAMS/CRITICAL JUNCTURE* DI KABUPATEN OGAN ILIR

Karya tulis ilmiah berupa tesis, Desember 2024

Ade Kurniawan, dibimbing oleh Dr. Raniasa, S.IP., M.Si dan Dr. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si

xvii+200 halaman, 15 tabel, 12 gambar, 15 lampiran

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir telah mengambil langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas administrasi melalui implementasi aplikasi SEMESTA. Aplikasi ini dirancang untuk mendigitalisasi berbagai proses administrasi, seperti presensi, laporan kinerja harian (LKH), dan pengelolaan surat-menyurat, guna mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesiapan teknis hingga penerimaan oleh pengguna.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi aplikasi SEMESTA menggunakan teori *Multiple Streams/Critical Juncure* dari Michael Howlett (2019). Teori ini mencakup empat aliran kebijakan: aliran masalah, aliran kebijakan, aliran politik, dan aliran program. Pada aliran program, penelitian ini menggunakan 12 indikator dari Apleni dan Smuts (2020), seperti pendanaan, kerangka hukum, infrastruktur TIK, pemberdayaan pengguna, kesadaran pengguna, dan manajemen perubahan, untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Lalu, untuk teknik analisis data digunakan teknik analisis dari Creswell dengan enam tahapan analisis kualitatif. Fokus penelitian ini adalah menganalisis proses implementasi kebijakan *e-government* melalui aplikasi SEMESTA di Kabupaten Ogan Ilir yang didasari Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Ogan Ilir menggunakan teori *Multiple Streams/Critical Juncure* dari Michael Howlett (2019). Dimensi analisis terdiri dari empat dimensi, yaitu aliran masalah, kebijakan, politik, dan program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SEMESTA diterapkan untuk mengatasi berbagai permasalahan mendasar, seperti lambannya proses administrasi manual, manipulasi presensi dan laporan kinerja, inefisiensi anggaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), serta rendahnya tingkat kehadiran dan kinerja pegawai. Dari sisi kebijakan, aplikasi SEMESTA dipilih setelah mempertimbangkan berbagai alternatif, seperti optimalisasi sistem manual, penggunaan mesin fingerprint, dan outsourcing pengelolaan administrasi, yang

dinilai kurang efektif untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Dukungan politik dari Bupati dan legislatif juga menjadi faktor pendorong utama dalam implementasi kebijakan ini, dengan alokasi anggaran dan arahan strategis yang jelas.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa 10 dari 12 indikator pada aliran program menjadi faktor penghambat implementasi aplikasi SEMESTA. Tantangan utama meliputi keterbatasan pendanaan, kurangnya regulasi khusus yang mengatur tata kelola aplikasi, minimnya pelatihan bagi pegawai, resistensi terhadap perubahan, rendahnya kesadaran pengguna, serta masalah infrastruktur TIK dan keamanan data. Meski demikian, terdapat dua faktor pendukung utama, yaitu keterlibatan stakeholder, termasuk Diskominfo dan BKPSDM, serta dukungan kuat dari manajemen puncak yang memastikan kebijakan ini berjalan sesuai rencana.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan implementasi aplikasi SEMESTA. Pertama, penyusunan regulasi khusus yang mencakup aspek operasional, perlindungan data, dan integrasi sistem antar-OPD. Kedua, peningkatan anggaran untuk pengembangan infrastruktur, termasuk jaringan internet di daerah terpencil dan peningkatan kapasitas server. Ketiga, pelatihan berkelanjutan bagi seluruh pegawai, khususnya di OPD yang masih menghadapi tantangan teknis. Keempat, penguatan mekanisme pemberdayaan pengguna melalui platform *feedback* yang terintegrasi. Kelima, pengembangan *roadmap* strategis untuk menjadikan aplikasi SEMESTA sebagai Super Apps yang mampu mengintegrasikan berbagai fungsi layanan pemerintah.

Melalui analisis *Multiple Streams/Critical Juncture*, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang proses implementasi aplikasi SEMESTA, termasuk tantangan, peluang, dan langkah perbaikan yang diperlukan untuk mendukung transformasi digital di Kabupaten Ogan Ilir. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam upaya mengadopsi *e-government* sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Kata kunci: implementasi kebijakan, aplikasi SEMESTA, *Multiple Streams/Critical Juncture*, reformasi birokrasi, *e-government*.

SUMMARY

IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT POLICY THROUGH SEMESTA APPLICATION WITH MULTIPLE STREAMS/CRITICAL JUNCTURE APPROACH IN OGAN ILIR REGENCY

Scientific paper in the form of a thesis, Desember 2024
Ade Kurniawan, supervised by Dr. Raniasa, S.IP., M.Si dan Dr. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si
xvii+200 pages, 15 tables, 12 figures, 15 attachments

The Ogan Ilir Regency Government has taken strategic steps to improve administrative efficiency, transparency, and accountability through the implementation of the SEMESTA application. This application is designed to digitize various administrative processes, such as attendance, daily performance reports, and correspondence management, to support bureaucratic reform and public services. However, the implementation of this policy still faces various challenges, ranging from technical readiness to acceptance by users.

This study aims to analyze the implementation process of the SEMESTA application using Michael Howlett's (2019) Multiple Streams Framework theory. This theory includes four policy streams: problem stream, policy stream, political stream, and program stream. In the program stream, this study uses 12 indicators from Apleni and Smuts (2020), such as funding, legal framework, ICT infrastructure, user empowerment, user awareness, and change management, to analyze the supporting and inhibiting factors of policy implementation.

The research method used in this research is descriptive qualitative research. Data collection techniques in this research are in-depth interviews, observation, and documentation studies. The technique of determining informants uses purposive sampling and snowball sampling methods. Then, for data analysis techniques, Creswell's analysis technique is used with six stages of qualitative analysis. The focus of this research is to analyze the implementation process of e-government policy through the Ogan Ilir Regency SEMESTA application based on Regent Regulation Number 42 of 2022 concerning the Implementation of Electronic-Based Government Systems in Ogan Ilir Regency using Michael Howlett's Multiple Streams/Critical Juncture theory (2019). The dimensions of analysis consist of four dimensions, namely problem, policy, political, and program streams.

The results showed that the SEMESTA application was implemented to overcome various fundamental problems, such as the slow process of manual administration, manipulation of attendance and performance reports, inefficiency of the Income Improvement Allowance (TPP) budget, and low levels of employee attendance and performance. From a policy perspective, the SEMESTA application was chosen after considering various alternatives, such as optimizing the manual system, using fingerprint machines, and outsourcing administrative management, which were considered less effective in solving the overall problem. Political support from the Regent and the legislature is also a major driving factor in the implementation of this policy, with budget allocations and clear strategic direction.

However, this study also found that 10 out of 12 indicators in the program flow were inhibiting factors in the implementation of the SEMESTA application. The main challenges include limited funding, lack of specific regulations governing application governance, lack of training for employees, resistance to change, low user awareness, and ICT infrastructure and data security issues. However, there are two main supporting factors, namely the involvement of stakeholders, including Diskominfo and BKPSDM, and strong support from top management that ensures this policy goes according to plan.

This study recommends several strategic steps to improve the implementation of the SEMESTA application. First, the drafting of specific regulations covering operational aspects, data protection, and inter-OPD system integration. Second, increasing the budget for infrastructure development, including internet networks in remote areas and increasing server capacity. Third, continuous training for all employees, especially in OPDs that still face technical challenges. Fourth, strengthening the user empowerment mechanism through an integrated feedback platform. Fifth, developing a strategic roadmap to make the SEMESTA application a Super Apps capable of integrating various government service functions.

Through the Multiple Streams Framework analysis, this research provides a comprehensive overview of the implementation of the SEMESTA application, including challenges, opportunities, and improvement steps needed to support digital transformation in Ogan Ilir Regency. This policy implementation is expected to serve as a model for other regions in their efforts to adopt e-government as part of bureaucratic reform and public service improvement.

Keywords: implementation, SEMESTA application, e-government, Multiple Streams/Critical Juncture

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan *E-Government* melalui Aplikasi SEMESTA dengan Pendekatan *Multiple Streams/Critical Juncture* di Kabupaten Ogan Ilir” ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulisan tesis ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas atas dukungan penuh melalui pemberian beasiswa studi S2 Dalam Negeri yang telah memungkinkan penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini;
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis pada proses penyusunan tesis ini;
5. Bapak dan Ibu dosen penguji yang telah memberikan saran terkait dengan penulisan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar Program Studi Magister Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama awal perkuliahan hingga penyelesaian penulisan tesis ini;
7. Bapak Panca Wijaya Akbar, SH selaku Bupati Kabupaten Ogan Ilir dan Bapak Ardani S.H M.H selaku Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir;

8. Bapak Muhammad Ridhon, S.Sos, M.Si selaku Asisten I Bupati Ogan ilir yang telah mendukung dan memberikan izin untuk saya menjalani tugas belajar;
9. Ibu Santi Novita Sari, S.H., M.H. Selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir yang telah memberikan izin selama proses perkuliahan;
10. Bapak Ferdian Riza Yudha, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Kominfo;
11. Wilson Efendi, S.H., M.Si. selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Ogan Ilir;
12. Mba Meta dan Mba Rini selaku admin MAP yang telah membantu dalam proses administrasi perkuliahan dan tesis;
13. Teman-teman MAP; dan
14. Adik-adik saya yang senantiasa memberikan dukungan dan doa.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi substansi maupun metodologi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan *e-government* khususnya pada aplikasi SEMESTA di Kabupaten Ogan Ilir, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan tambahan, baik bagi akademisi, praktisi, maupun pembaca lainnya.

Palembang, 11 Januari 2025



Ade Kurniawan
07012682327026

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Ade Kurniawan, lahir di Palembang pada tanggal 3 Oktober 1993 merupakan anak pertama dari lima bersaudara pasangan Ibu Rukiah dan Bapak Gunawan. Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri 1 Palembang pada tahun 1999, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Palembang pada tahun 2005. Pada tahun 2008, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Palembang mengambil jurusan IPA. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah pada tahun 2011, penulis mengikuti ujian SBMPTN dan dinyatakan lulus sebagai mahasiswa Universitas Sriwijaya jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana dengan bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Indonesia lewat program Bidikmisi pada tahun 2016, penulis bekerja di beberapa hotel di Kota Palembang, kemudian pada tahun 2020 penulis lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan mengambil formasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir, kemudian setelah 2 tahun bekerja sebagai ASN penulis mengikuti seleksi beasiswa dari Pusbindiklatren Bappenas dan dinyatakan lulus sehingga dapat melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa Magister Administrasi Publik di Universitas Sriwijaya pada tahun 2023.

HALAMAN PERSEMBAHAN

“No matter how many times you fall. A winner will keep getting up while a loser will keep lying on the ground”

“Tidak peduli berapa kali kamu terjatuh. Seorang pemenang akan selalu bangkit sedangkan pecundang akan terus berbaring di tanah”

“A lesson without pain is meaningless. That’s because you can’t gain something without sacrificing something in return. But by enduring that pain and overcoming it, you shall gain a heart that is stronger than anything ”

“Sebuah pelajaran tanpa adanya rasa sakit tidak akan ada artinya. sebab kamu tidak dapat memperoleh sesuatu tanpa mengorbankan sesuatu sebagai gantinya. Tetapi dengan menahan rasa sakit itu dan mengatasinya, kamu akan mendapatkan hati yang lebih kuat dari apa pun”

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- **Orang tua tercinta**, yang meskipun telah tiada, tetap menjadi cahaya abadi dalam setiap langkah. Segala pencapaian ini adalah doa yang kupersembahkan
- **Saudara-saudari**, yang selalu menjadi pondasi dan sumber kekuatan
- **Orang yang kusayangi**, yang telah memberiku alasan untuk terus maju dan bermimpi
- **Pemerintah Indonesia**, sebagai wujud rasa terima kasih atas kesempatan pendidikan luar biasa yang telah kudapatkan dengan dukungan penuh melalui program-program beasiswa dari sekolah dasar hingga S2
- **Almamater tercinta**, yang telah menjadi tempat bertumbuh, belajar, dan berkarya
- **Diriku sendiri**, di masa lalu yang penuh mimpi, di masa kini yang berjuang, dan di masa depan yang akan terus belajar dan berusaha mewujudkan mimpi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	x
KATA PENGANTAR	xii
RIWAYAT HIDUP PENELITI	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Landasan Teori	16
2.2. Kebijakan Publik	16
2.3. Implementasi Kebijakan Publik	17
2.4. Perkembangan Teori Implementasi Kebijakan Publik	18
2.4.1. Teori Implementasi Kebijakan: Pendekatan Awal	19
2.4.2. Evolusi Teori Implementasi Kebijakan	20

2.4.3. Teori Implementasi Kontemporer	20
2.4.4. Pendekatan Terbaru dalam Teori Implementasi Kebijakan	20
2.5. <i>Multiple Streams/Critical Juncture</i> oleh Michael P. Howlett	21
2.5.1. <i>Policy Cycle Model</i>	21
2.5.2. <i>Multiple Streams Framework</i>	22
2.5.3. <i>Advocacy Coalition Framework</i>	24
2.5.4. <i>Multiple Streams/Critical Juncture</i>	27
2.6. <i>E-Government</i> atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	34
2.6.1. Konsep <i>E-Government</i> dan <i>Good Governance</i>	34
2.6.2. <i>E-Government</i> di Indonesia	34
2.6.3. <i>E-Government</i> di Kabupaten Ogan Ilir	37
2.6.4. SEMESTA (Sistem Elektronik Manajemen Administrasi).....	38
2.7. Penelitian Terdahulu	40
2.8. Teori yang digunakan dalam penelitian ini	48
2.9. Kerangka Pemikiran.....	49
2.9.1. Aliran Proses.....	49
2.9.2. Aliran Masalah.....	50
2.9.3. Aliran Kebijakan.....	50
2.9.4. Aliran Politik	50
2.9.5. Aliran Program.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1. Desain Penelitian	52
3.2. Definisi Konsep.....	52
3.3. Fokus Penelitian	55
3.4. Unit Analisis dan Unit Observasi.....	59
3.5. Data dan Sumber Data	59
3.5.1. Data.....	59
3.5.2. Sumber Data.....	59
3.6. Informan Penelitian.....	61
3.6.1. Kriteria Informan	61
3.6.2. <i>Key Informant</i>	61
3.7. Teknik Pengumpulan Data	62
3.8. Teknik Pengabsahan Data.....	64
3.9. Teknik Analisis Data.....	65

3.10. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	67
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	69
4.1. Kabupaten Ogan Ilir.....	69
4.2. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ogan Ilir ...	72
4.3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Ogan Ilir	74
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	76
5.1. Hasil Penelitian.....	76
5.2. Aliran Proses (<i>Process Stream</i>).....	76
5.3. Aliran Masalah (<i>Problem Stream</i>)	77
5.4. Aliran Kebijakan (<i>Policy Stream</i>).....	80
5.5. Aliran Politik (<i>Politics Stream</i>).....	84
5.6. Aliran Program (<i>Program Stream</i>)	91
5.6.1. Pendanaan.....	92
5.6.2. Kerangka Hukum.....	94
5.6.3. Tujuan Organisasi	97
5.6.4. Visi dan strategi yang jelas	100
5.6.5. Pelatihan	102
5.6.6. Kesadaran.....	105
5.6.7. Keterlibatan Pemangku Kepentingan	107
5.6.8. Efikasi Komputer Pengguna (Kemampuan Penggunaan Aplikasi).....	109
5.6.9. Pemberdayaan Pengguna	110
5.6.10. Dukungan Manajemen Tingkat Atas.....	112
5.6.11. Infrastruktur TIK dan Sistem Keamanan	113
5.6.12. Manajemen Perubahan.....	116
5.7. Pembahasan	121
5.8. Faktor Pendukung	123
5.9. Faktor Penghambat.....	124
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	142
6.1. Kesimpulan.....	142
6.2. Saran.....	143
DAFTAR PUSTAKA	145
LAMPIRAN.....	152

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Sumatera Selatan Tahun 2022	5
Gambar 2.1 <i>Policy Cycle Model</i> dari Lasswell	22
Gambar 2.2 Model <i>E-Government</i> Berdasarkan Jenis Interaksi	37
Gambar 2.3 Tampilan Website SEMESTA	38
Gambar 2.4 Tampilan Aplikasi SEMESTA di <i>Smartphone</i>	39
Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran	53
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Ogan Ilir	73
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kabupaten Ogan Ilir	76
Gambar 5.1 Kunjungan Kerja Bupati Ogan Ilir ke Kabupaten Sumedang	87
Gambar 5.2 Rapat Pembahasan Aplikasi SEMESTA yang Dihadiri Bupati ...	89
Gambar 5.3 Pelatihan atau Bimbingan Teknis Aplikasi SEMESTA	104
Gambar 5.4 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penerapan Aplikasi SEMESTA ..	108

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Perbandingan EGDI di Asia Tenggara Tahun 2022 1
Tabel 1.2	Jumlah desa per kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir yang memiliki keterbatasan akses internet 7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu 40
Tabel 3.1	Fokus Penelitian 57
Tabel 3.2	Daftar <i>Key Informants</i> 64
Tabel 3.3	Daftar Informan Pendukung 64
Tabel 3.4	Jadwal Penelitian 70
Tabel 5.1	Hasil Identifikasi Aliran Masalah Dalam Implementasi Kebijakan <i>E-Government</i> Melalui Aplikasi SEMESTA Dengan Pendekatan <i>Multiple Streams/Critical Juncture</i> di Kabupaten Ogan Ilir 81
Tabel 5.2	Hasil Identifikasi Aliran Kebijakan Dalam Implementasi Kebijakan <i>E-Government</i> Melalui Aplikasi SEMESTA Dengan Pendekatan <i>Multiple Streams/Critical Juncture</i> di Kabupaten Ogan Ilir 85
Tabel 5.3	Hasil Identifikasi Aliran Politik Dalam Implementasi Kebijakan <i>E-Government</i> Melalui Aplikasi SEMESTA Dengan Pendekatan <i>Multiple Streams/Critical Juncture</i> di Kabupaten Ogan Ilir 91
Tabel 5.4	Hasil Identifikasi Aliran Program Dalam Implementasi Kebijakan <i>E-Government</i> Melalui Aplikasi SEMESTA Dengan Pendekatan <i>Multiple Streams/Critical Juncture</i> di Kabupaten Ogan Ilir 119
Tabel 5.5	Triangulasi Sumber Aliran Masalah, Kebijakan dan Politi 127
Tabel 5.6	Triangulasi Sumber Aliran Program 130

DAFTAR SINGKATAN

1. ASN : Aparatur Sipil Negara
2. BKPSDM : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. BSSN : Badan Siber dan Sandi Negara
4. ICT : *Information and Communication Technology*
5. IKP : Informasi dan Komunikasi Publik
6. LKH : Laporan Kinerja Harian
7. OPD : Organisasi Perangkat Daerah
8. RB : Reformasi Birokrasi
9. SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. SE : Surat Edaran
11. SEMESTA : Sistem Elektronik Manajemen Administrasi
12. SPBE : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
13. TPP : Tambahan Penghasilan Pegawai
14. TIK : Teknologi Informasi dan Komunikasi
15. G2C : *Government to Citizen*
16. G2B : *Government to Business*
17. G2G : *Government to Government*
18. G2E : *Government to Employee*
19. EGDI : *E-Government Development Index*
20. PP : Peraturan Pemerintah
21. Perbup : Peraturan Bupati
22. Perda : Peraturan Daerah
23. SOP : (*Standard Operational Procedure*) Prosedur Operasional Standar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat global telah mendorong Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan teknologi dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance*, yang akan meningkatkan layanan publik kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menyediakan layanan kepada masyarakat disebut Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government* (Haerofiatna & Chaidir, 2023; Hafel et al., 2022).

Menurut survei *E-Government Development Index* (EGDI) tahun 2020 yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia berada di posisi ke-7 dari 10 negara di Asia Tenggara dan peringkat ke-88 di dunia. Indonesia tertinggal dari Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam, dengan jarak yang signifikan dibandingkan Singapura (Wahyudin, 2023). Perkembangan terbaru pada *e-government* Indonesia dapat dilihat dari survei *E-Government Development Index* (EGDI) yang kembali dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 2022, perbandingan perkembangan *e-government* Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Perbandingan *E-Government Development Index* (EGDI) Di Asia Tenggara Tahun 2022 (<https://publicadministration.un.org/>, 2024)

Peringkat ASEAN	Nama Negara	Peringkat <i>e-government</i>	Indeks <i>e-government</i>	Indeks <i>e-participation</i>
1	Singapura	12	0.9133	0.9773
2	Malaysia	53	0.7740	0.6818
3	Thailand	55	0.7660	0.7841

Peringkat ASEAN	Nama Negara	Peringkat <i>e-government</i>	Indeks <i>e-government</i>	Indeks <i>e-participation</i>
4	Brunei Darussalam	68	0.7270	0.4773
5	Indonesia	77	0.7160	0.7159
6	Vietnam	86	0.6787	0.5341
7	Filipina	89	0.6523	0.4886
8	Kamboja	127	0.5056	0.2841
9	Myanmar	134	0.4994	0.3068
10	Timor Leste	147	0.4372	0.4773
11	Laos	159	0.3764	0.2614

Merujuk pada data di atas, Indonesia berhasil naik peringkat dari 7 ke peringkat 5 negara di Asia Tenggara dan peringkat ke-77 di dunia. Kenaikan 11 peringkat ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menerapkan *e-government*. Namun, Indonesia masih perlu terus meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), anggaran, dan tingkat literasi digital di kalangan pegawai dan masyarakat, keterampilan sumber daya manusia, keamanan dan privasi data, koordinasi antara lembaga pemerintah, partisipasi dan dukungan masyarakat, dan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk lebih memperkuat implementasi *e-government* dan mencapai peringkat yang lebih tinggi di masa depan (Asogwa, 2013; Rana et al., 2019).

Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Indonesia mendorong penerapan *e-government* pada Pemerintah Daerah seluruh Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan, diantaranya Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai teknologi informasi di Indonesia yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informasi) pada 24 April 2001. Kebijakan ini menyatakan bahwa pejabat pemerintah harus memanfaatkan teknologi telematika untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta mempercepat proses demokrasi. Pemerintah Pusat lalu mengeluarkan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* Indonesia, yang menginstruksikan kepada setiap Gubernur dan Bupati/Walikota

untuk mengambil langkah-langkah konkret yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing pimpinan daerah untuk pelaksanaan pengembangan *e-government* nasional (Kurniadi, 2019). Kemudian, Pemerintah memperbarui kebijakan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Seiring dengan kebijakan *e-government* yang telah dikeluarkan Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir juga turut serta mendukung dan berupaya mengimplementasikan *e-government* di daerahnya dalam upaya meningkatkan layanan publik. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebelumnya belum dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari nilai Reformasi Birokrasi (RB) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2022 yang masih dalam kategori C atau cukup untuk nilai RB dan CC untuk nilai AKIP. Nilai ini masih dibawah nilai rata-rata RB dan AKIP Provinsi Sumatera Selatan, yaitu BB atau baik. Dengan adanya implementasi *e-government* diharapkan dapat mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Ogan Ilir,

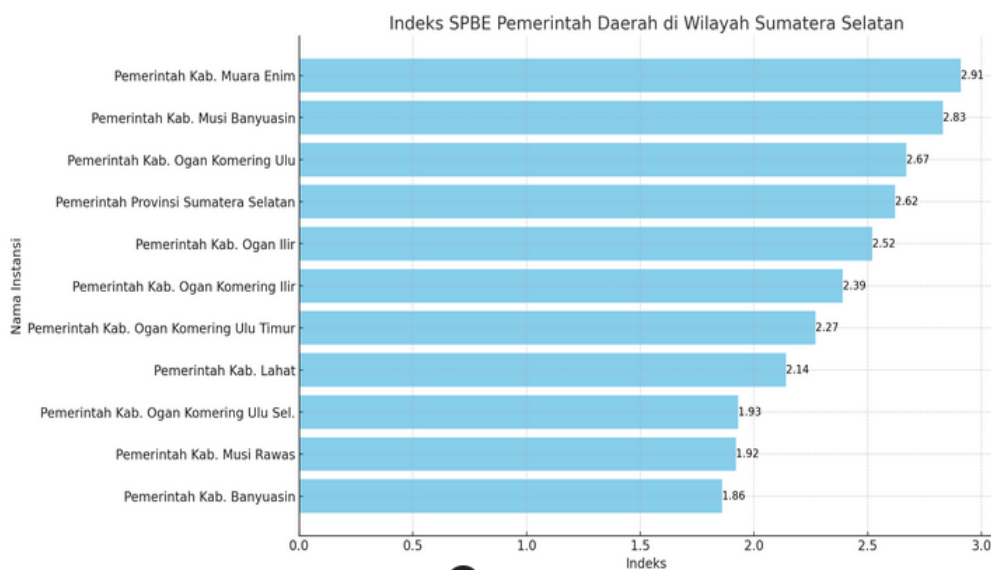
Maka, untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik yang optimal di Kabupaten Ogan Ilir, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melakukan transformasi Pemerintah Daerah ke arah Pemerintah Daerah terdigitalisasi. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih optimal melakukan implementasi *e-government* atau sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerahnya. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir nomor 42 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan salah satunya melalui aplikasi Sistem Elektronik Manajemen Administrasi (SEMESTA).

Manajemen administrasi yang efektif dalam pemerintahan daerah adalah kunci untuk memastikan layanan publik yang responsif dan efisien. Namun, banyak daerah masih bergulat dengan birokrasi yang kompleks, proses administrasi yang lambat, dan kurangnya transparansi dalam manajemen kepegawaian, hal ini juga dialami oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Aplikasi SEMESTA sebenarnya telah diimplementasikan sejak tahun 2021 dengan nama aplikasi yaitu *e-office*, pada

mulanya aplikasi SEMESTA hanya memiliki fitur presensi online *smartphone*, pelaporan Laporan Kinerja Harian (LKH) dan perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), penerapan *e-office* didasarkan kondisi saat itu di mana manajemen administrasi pemerintahan terutama terkait presensi pegawai, pelaporan LKH dan perhitungan TPP yang masih dilakukan secara manual. Proses manual selain membutuhkan waktu lama dalam prosesnya juga sangat rentan terhadap kesalahan dan memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan kecurangan sehingga menjadi hambatan utama dalam meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan. Alasan lainnya adalah TPP yang diterima oleh ASN pada saat itu belum sepenuhnya memenuhi harapan pegawai, karena pegawai yang hadir tepat waktu dan bekerja keras menerima TPP yang sama dengan pegawai yang sering terlambat dan kurang produktif.

Di tahun 2024 *e-office* kemudian bertransformasi menjadi Aplikasi SEMESTA untuk meningkatkan integrasi dengan sistem manajemen yang lain, saat ini sistem yang ditambahkan ke dalamnya adalah pengelolaan surat elektronik dan sistem informasi kepegawaian. Aplikasi SEMESTA merupakan aplikasi yang memfasilitasi proses aktifitas administrasi di Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir. Di dalamnya terdapat fitur presensi online dengan *geolocation* dan *face recognition* yang berbasis *smartphone*, fitur Laporan Kinerja Harian (LKH), surat elektronik dan fitur kepegawaian. Dengan integrasi berbagai fitur ini, SEMESTA diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Pelaksanaan aplikasi SEMESTA di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terus diupayakan dalam rangka mendukung pelaksanaan *e-government*. Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dikutip dari menpan.go.id bahwa berdasarkan Keputusan Menteri PANRB 2023 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 meraih predikat Baik pada evaluasi SPBE 2022 kategori Pemerintahan Daerah Kabupaten ditingkat Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Musi Banyuasin. Sementara Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir berada di bawahnya, mendapat peringkat Cukup dengan nilai indeks SPBE 2,52.



Gambar 1.1 Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Sumatera Selatan Tahun 2022 (*website menpan.go.id*, 2024)

Aplikasi SEMESTA di Kabupaten Ogan Ilir diperkenalkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah-masalah administratif yang ada. Namun, implementasinya tidak tanpa hambatan. Beberapa masalah utama yang dihadapi meliputi:

1. Keterbatasan Infrastruktur TIK: Keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi di beberapa wilayah menghambat optimalisasi penggunaan aplikasi ini (Thompson & Jaeger, 2003).
2. Keterbatasan Anggaran: Implementasi aplikasi SEMESTA membutuhkan anggaran yang signifikan untuk pelatihan, pembaruan infrastruktur, dan pemeliharaan sistem, yang kadang tidak sepenuhnya tersedia (Heeks, 2003).
3. Keamanan Sistem Informasi.
4. Ketidakmerataan Kemampuan Penggunaan Teknologi: Tidak semua ASN (terutama pegawai yang sudah senior) memiliki kemampuan yang memadai dalam menggunakan teknologi baru, yang mengakibatkan resistensi dan kesulitan dalam adopsi aplikasi SEMESTA (Dunleavy et al., 2011; Hanna, 2010).
5. Kompleksitas Perubahan Organisasi: Perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik membutuhkan perubahan budaya organisasi yang tidak selalu mudah diterapkan (Luna-Reyes & Gil-Garcia, 2011).

Untuk penjelasan lebih lengkap akan diuraikan sebagai berikut:

Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan salah satu tantangan utama yang menghambat implementasi *e-government* melalui aplikasi SEMESTA di Kabupaten Ogan Ilir. Infrastruktur TIK mencakup akses internet, perangkat teknologi (seperti komputer, smartphone, dan server), serta jaringan komunikasi yang handal. Menurut Thompson dan Jaeger (2003), keberhasilan *e-government* sangat bergantung pada aksesibilitas infrastruktur teknologi yang mendukung, terutama dalam konteks wilayah pedesaan atau terpencil, di mana keterbatasan akses internet menjadi masalah yang umum.

Di banyak wilayah, terutama pedesaan, keterbatasan infrastruktur internet disebabkan oleh terbatasnya cakupan jaringan broadband dan lemahnya kualitas sinyal. Hal ini menurunkan kelancaran penggunaan aplikasi *e-government* seperti SEMESTA yang membutuhkan akses internet stabil. Tanpa infrastruktur yang memadai, aplikasi ini tidak dapat digunakan secara optimal oleh pegawai.

Keterbatasan infrastruktur ini berdampak langsung pada pelaksanaan tugas administratif dan pelayanan publik. Pegawai yang harus mengakses aplikasi SEMESTA untuk melaporkan kinerja atau memanfaatkan fitur-fitur seperti absensi online sering kali mengalami kendala dalam mengakses sistem, terutama di wilayah yang sinyalnya tidak stabil atau tidak memiliki jaringan internet yang kuat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Heeks (2003), kendala infrastruktur teknologi seperti ini sangat umum di negara-negara berkembang, di mana banyak wilayah yang belum memiliki akses internet yang memadai. Heeks juga menyatakan bahwa tanpa infrastruktur yang tepat, penerapan sistem *e-government* dapat menjadi tidak efektif dan menimbulkan frustrasi di kalangan pengguna.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ogan Ilir, beberapa kecamatan di wilayah ini menghadapi masalah keterbatasan akses internet yang signifikan. Data jumlah desa per kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir yang memiliki keterbatasan akses internet dapat dilihat pada Tabel 1.2:

Tabel 1.2 Jumlah desa per kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir yang memiliki keterbatasan akses internet (BPS Kabupaten Ogan Ilir, 2024)

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Desa Dengan Keterbatasan Internet
1	Kecamatan Rantau Panjang	12	1
2	Kecamatan Pemulutan Selatan	15	1
3	Kecamatan Pemulutan Barat	11	3
4	Kecamatan Indralaya	20	5
5	Kecamatan Kandis	12	3
6	Kecamatan Sungai Pinang	13	4
7	Kecamatan Rambang Kuang	13	4
8	Kecamatan Pemulutan	25	3
9	Kecamatan Tanjung Raja	19	4
10	Kecamatan Lubuk Keliat	10	4
11	Kecamatan Indralaya Selatan	14	1
12	Kecamatan Tanjung Batu	21	1
13	Kecamatan Payaraman	13	2
14	Kecamatan Muara Kuang	14	4
15	Kecamatan Indralaya Utara	16	1
16	Kecamatan Rantau Alai	13	1

Dari data di atas, jelas bahwa keterbatasan sinyal atau akses internet masih terjadi di banyak desa di Kabupaten Ogan Ilir. Hal ini merupakan hambatan serius bagi keberhasilan implementasi aplikasi SEMESTA. Dampak dari keterbatasan infrastruktur ini sangat signifikan, terutama pada operasional aplikasi SEMESTA dalam mendukung pelaporan kinerja, presensi berbasis *geolocation*, serta pengelolaan data pegawai melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Dengan sinyal internet yang tidak stabil, pegawai sering kali tidak dapat melakukan pelaporan tepat waktu, dan ini menghambat alur kerja administratif.

Menurut Dunleavy et al. (2011), dalam konteks *e-government*, infrastruktur teknologi yang kurang baik tidak hanya menghambat implementasi, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan pengguna terhadap sistem tersebut. Ketika pegawai mengalami kesulitan akses, mereka cenderung merasa frustrasi dan dapat

mengurangi tingkat adopsi teknologi baru, yang pada akhirnya dapat menghambat transformasi digital pemerintah.

Keterbatasan infrastruktur TIK terkait juga dengan keterbatasan anggaran yang sering menjadi penghambat dalam pengembangan infrastruktur TIK. Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memastikan bahwa semua wilayah memiliki akses yang memadai ke teknologi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi *e-government* seperti SEMESTA.

Keterbatasan anggaran merupakan salah satu faktor signifikan yang mempengaruhi implementasi aplikasi e-government seperti SEMESTA di Kabupaten Ogan Ilir. Menurut Heeks (2003), banyak negara berkembang dan daerah-daerah yang menghadapi kendala besar dalam implementasi sistem teknologi baru karena kurangnya anggaran yang tersedia. Penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan membutuhkan sumber daya finansial yang besar, terutama untuk pelatihan, pengembangan infrastruktur, serta pemeliharaan sistem yang berkelanjutan. Tanpa alokasi anggaran yang cukup, implementasi e-government sering kali terhenti di tengah jalan atau berjalan dengan kualitas yang tidak optimal.

Aplikasi SEMESTA merupakan platform *e-government* yang mengelola berbagai fungsi administrasi seperti absensi, laporan kinerja harian pegawai, dan pengelolaan data pegawai. Untuk menjalankan aplikasi ini dengan baik, terdapat beberapa komponen biaya yang penting, antara lain:

1. Pelatihan Pegawai

Untuk memastikan pegawai di setiap unit kerja memahami cara menggunakan aplikasi SEMESTA, dibutuhkan pelatihan berkelanjutan. Pegawai yang tidak familiar dengan teknologi memerlukan sesi pelatihan intensif yang tentunya memerlukan biaya.

2. Pembaruan Infrastruktur

Infrastruktur TIK seperti server, jaringan, dan perangkat keras lainnya harus terus diperbarui agar dapat mengimbangi perkembangan teknologi yang cepat. Hal ini membutuhkan investasi yang signifikan, terutama di wilayah yang

masih memiliki keterbatasan akses internet atau perangkat yang kurang memadai.

3. Pemeliharaan Sistem

Aplikasi *e-government* membutuhkan pemeliharaan rutin untuk memastikan bahwa sistem tetap berjalan lancar tanpa gangguan. Pemeliharaan ini termasuk pembaruan perangkat lunak, pengamanan data, dan pengelolaan server.

Berdasarkan laporan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ogan Ilir, anggaran yang dialokasikan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir melalui APBD sebesar Rp. 598.919.300. Dana ini dialokasikan untuk dua kegiatan utama yaitu:

1. Pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: Meliputi pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi SEMESTA dan sistem *e-government* lainnya yang ada di Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pengembangan Aplikasi Informatika: Termasuk dalam pengembangan fitur-fitur tambahan yang dibutuhkan oleh aplikasi SEMESTA untuk mendukung kegiatan administrasi pemerintah daerah.

Kemudian dalam laporan tersebut juga menyatakan bahwa "Masih kurangnya dukungan anggaran melalui APBD untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian," yang menunjukkan bahwa anggaran yang ada tidak mencukupi kebutuhan yang sebenarnya untuk pelaksanaan penuh aplikasi SEMESTA.

Keamanan sistem informasi menjadi isu penting dalam implementasi aplikasi *e-government*, seperti Aplikasi SEMESTA di Kabupaten Ogan Ilir. Sebagai sistem yang menangani data penting pemerintahan dan pelayanan publik, perlindungan terhadap data dan keamanan infrastruktur teknologi informasi sangatlah krusial.

Berdasarkan Renstra Diskominfo Kabupaten Ogan Ilir tahun 2021-2026, salah satu tujuan strategis adalah meningkatkan pengelolaan keamanan sistem informasi untuk mendukung kelancaran implementasi *e-government* di daerah

tersebut. Renstra ini mencatat pentingnya peningkatan keamanan sistem agar dapat menangkal ancaman yang semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi informasi, serta mencegah akses tidak sah ke data pemerintahan yang sensitif. Ini melibatkan peningkatan standar operasional keamanan sistem, audit keamanan secara berkala, serta pelatihan kepada pegawai terkait praktik terbaik dalam menjaga keamanan data.

Pada konteks keamanan sistem informasi, Sutabri et al. (2023) dalam jurnal mereka yang berjudul *Evaluasi Risiko Celah Keamanan Aplikasi e-office menggunakan Metode OWASP di Kabupaten Ogan Ilir* menemukan adanya 18 celah keamanan yang berpotensi dieksploitasi dalam aplikasi serupa, 4 utama di antaranya meliputi:

- Kerentanan pada otentikasi, proses otentikasi yang lemah memudahkan akses tidak sah.
- Akses kontrol yang buruk, kebijakan akses yang tidak jelas atau salah konfigurasinya memungkinkan pengguna tanpa otoritas dapat mengakses data yang seharusnya terbatas.
- Konfigurasi yang rentan, kesalahan konfigurasi sistem memungkinkan penyerang untuk mengeksploitasi kelemahan.
- Input data yang tidak terfilter dengan baik, celah ini memungkinkan terjadinya serangan injeksi, seperti *SQL injection* dan *cross-site scripting (XSS)*.

Temuan ini relevan bagi aplikasi SEMESTA karena potensi ancaman keamanan serupa mungkin terjadi, mengingat aplikasi ini digunakan secara luas di lingkungan pemerintahan. Pengelolaan data pemerintahan yang rentan terhadap akses tidak sah, serangan siber, atau manipulasi data dapat menimbulkan risiko signifikan terhadap integritas sistem pemerintahan.

Salah satu tantangan besar dalam implementasi aplikasi *e-government* seperti SEMESTA di Kabupaten Ogan Ilir adalah ketidakmerataan kemampuan penggunaan teknologi di antara Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama di kalangan pegawai senior. Menurut Dunleavy et al. (2011) dan Hanna (2010), ketidakmampuan dalam mengadopsi teknologi baru sering kali menjadi penghambat utama dalam penerapan sistem berbasis teknologi di lingkungan

pemerintahan. Mereka mencatat bahwa pegawai yang lebih senior sering kali mengalami resistensi terhadap perubahan, baik karena kurangnya pengetahuan teknologi maupun karena kebiasaan lama dalam bekerja dengan sistem manual. Masalah ini seringkali diperparah oleh gap generasi di dalam pemerintahan. Pegawai yang lebih muda cenderung lebih terbiasa dengan penggunaan teknologi informasi, sedangkan pegawai yang lebih senior mungkin merasa tidak nyaman atau kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem baru. Kondisi ini menyebabkan perbedaan signifikan dalam efisiensi kerja dan tingkat penerimaan teknologi antara generasi yang berbeda.

Dalam konteks Kabupaten Ogan Ilir, masalah ini dibahas dalam Rencana Kerja (Renja) Diskominfo 2023. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa terdapat kesenjangan dalam kemampuan teknologi antara pegawai senior dan junior. Renja Diskominfo 2023 menyoroti bahwa perubahan pola pikir, sikap, dan budaya kerja di kalangan ASN sangat penting untuk mendukung pelaksanaan *e-government*, termasuk aplikasi SEMESTA. Renja tersebut mencatat bahwa meskipun sosialisasi mengenai *e-government* telah dilakukan, banyak ASN masih kesulitan dalam mengadopsi teknologi baru.

Menurut Renja Diskominfo 2023, strategi *Awakening* (Kebangkitan) yang diimplementasikan bertujuan untuk mempromosikan perubahan pola pikir dan sikap ASN, namun tantangan besar masih ada pada kurangnya keterampilan teknologi di kalangan pegawai senior. Diskominfo juga mengidentifikasi bahwa resistensi terhadap perubahan menjadi hambatan signifikan dalam pengadopsian aplikasi SEMESTA. Salah satu faktor yang mempengaruhi resistensi ini adalah kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang memadai. Pegawai yang lebih senior sering kali tidak memiliki keterampilan dasar teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan aplikasi berbasis web dan aplikasi seperti SEMESTA, yang memengaruhi efektivitas penggunaan sistem tersebut.

Dalam laporan Renja Diskominfo 2023, dijelaskan bahwa salah satu tujuan strategis adalah peningkatan kemampuan ASN dalam menggunakan teknologi informasi melalui pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan. Namun, laporan tersebut menyatakan bahwa pelatihan yang diberikan tidak mencakup seluruh pegawai,

terutama yang berlokasi di wilayah pedesaan dengan akses internet yang terbatas. Hal ini menyebabkan ketimpangan yang lebih besar antara pegawai di pusat kota dan di desa-desa terpencil dalam hal kemampuan teknologi.

Perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik, seperti yang dilakukan dengan aplikasi SEMESTA, membutuhkan transformasi mendasar dalam hal budaya organisasi yang sering kali sulit untuk diterapkan. Luna-Reyes & Gil-Garcia (2011) menekankan bahwa perubahan teknologi dalam organisasi pemerintahan tidak hanya melibatkan penerapan sistem baru, tetapi juga transformasi dalam cara kerja, komunikasi, dan proses pengambilan keputusan. Transformasi ini sering kali memerlukan penyesuaian yang signifikan dari individu dan organisasi.

Dalam konteks aplikasi SEMESTA di Kabupaten Ogan Ilir, salah satu tantangan terbesar adalah resistensi perubahan yang berasal dari ketidakpastian dan ketidaknyamanan pegawai dalam meninggalkan sistem manual yang sudah mereka kenal dan beralih ke sistem berbasis teknologi. Resistensi ini biasanya muncul karena perubahan tersebut menuntut peningkatan keterampilan teknologi, penyesuaian terhadap alur kerja baru, serta perubahan dalam cara interaksi antarpegawai dan manajemen.

Budaya organisasi di sektor publik cenderung lebih hierarkis dan terstruktur, yang dapat memperlambat proses adaptasi terhadap inovasi teknologi. Luna-Reyes & Gil-Garcia (2011) juga mencatat bahwa resistensi perubahan dalam implementasi teknologi sering kali muncul dari ketidakjelasan manfaat jangka panjang yang dirasakan oleh pegawai, terutama di sektor publik yang memiliki struktur dan prosedur yang lebih ketat. Pegawai sering kali merasa tidak nyaman dengan perubahan yang tidak mereka pahami secara penuh, atau yang mereka anggap sebagai beban tambahan dalam pekerjaan sehari-hari.

Dalam kasus aplikasi SEMESTA, perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik juga melibatkan perubahan cara pelaporan, pengawasan, dan evaluasi kinerja, yang semuanya membutuhkan pemahaman baru dan penyesuaian. Pegawai yang terbiasa dengan sistem manual mungkin kesulitan dalam menghadapi tuntutan baru dari sistem yang berbasis teknologi informasi ini. Tanpa adanya dukungan

yang memadai dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, dan komitmen manajemen, perubahan ini sulit diterapkan secara efektif.

Dalam laporan Renja Diskominfo tahun 2023, masalah ini diakui secara eksplisit. Laporan tersebut mencatat bahwa transformasi dari sistem manual ke sistem elektronik membutuhkan perubahan mendasar dalam budaya kerja di lingkungan ASN Kabupaten Ogan Ilir. Dalam Renja tersebut ditekankan pentingnya perubahan pola pikir pegawai untuk mendukung pelaksanaan *e-government* secara optimal. Dalam bagian strategis Renja, disebutkan bahwa salah satu strategi utama yang diidentifikasi untuk menghadapi masalah ini adalah sosialisasi mengenai konsep *e-government* dan perubahan budaya kerja yang dibutuhkan. Laporan tersebut mencatat bahwa perubahan pola pikir dan sikap kerja ASN adalah elemen penting yang harus ditangani untuk memastikan bahwa seluruh pegawai, dari level manajemen hingga staf, mampu beradaptasi dengan sistem baru.

Berdasarkan Jenis Interaksi, aplikasi *e-government* dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis interaksi yang terlibat, yaitu *Government to Citizen* (G2C), *Government to Business* (G2B), *Government to Government* (G2G), dan *Government to Employee* (G2E) (Scholl & Scholl, 2014). Aplikasi SEMESTA di Kabupaten Ogan Ilir termasuk dalam kategori *Government to Employee* (G2E) dan *Government to Government* (G2G). Kategori G2E mencakup layanan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas internal pemerintahan dengan memfasilitasi interaksi dan manajemen karyawan pemerintah. Kategori G2G mencakup interaksi dan kolaborasi antar lembaga pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan konsistensi kebijakan.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menerapkan teori *Multiple Streams/Critical Juncture* untuk menganalisis implementasi aplikasi *e-government* di daerah. Selain itu, penelitian ini memperdalam analisis pada aliran program dengan menggunakan 12 indikator yang relevan dengan konteks kebijakan berbasis teknologi di Kabupaten Ogan Ilir.

Dari pemaparan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan, hambatan, serta upaya dalam proses implementasi kebijakan *e-government* melalui aplikasi SEMESTA dengan pendekatan *Multiple*

Streams/Critical Juncture di Kabupaten Ogan Ilir dalam rangka meningkatkan manajemen administrasi pemerintahan dengan menggunakan perspektif yang lebih holistik dan dapat menangkap kompleksitas yang terlibat dalam implementasi kebijakan *e-government* khususnya pada aplikasi SEMESTA di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan menggunakan teori *Multiple Streams/Critical Juncture* dari Michael Howlett (2019).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, rumusan masalah yang akan penulis lakukan untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses implementasi kebijakan *e-government* melalui aplikasi SEMESTA dengan pendekatan *Multiple Streams/Critical Juncture* di Kabupaten Ogan Ilir?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan *e-government* melalui aplikasi SEMESTA dengan pendekatan *Multiple Streams/Critical Juncture* di Kabupaten Ogan Ilir?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis proses implementasi kebijakan *e-government* melalui aplikasi SEMESTA dengan pendekatan *Multiple Streams/Critical Juncture* di Kabupaten Ogan Ilir.
2. Menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan *e-government* melalui aplikasi SEMESTA dengan pendekatan *Multiple Streams/Critical Juncture* di Kabupaten Ogan Ilir.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam memahami implementasi kebijakan *e-government* melalui aplikasi SEMESTA. Secara teoritis, penelitian ini memperluas penerapan pendekatan *Multiple Streams* dan *Critical Juncture* dengan menekankan pada bagaimana empat aliran (aliran masalah, kebijakan, politik, dan program) dapat diintegrasikan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan di tingkat pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan maupun rekomendasi kepada pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan *e-government* melalui aplikasi SEMESTA dalam hal ini Dinas Kominfo Kabupaten Ogan Ilir, BKPSDM Kabupaten Ogan Ilir, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, serta berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan *e-government* melalui aplikasi SEMESTA ini.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan penjelasan sebelumnya pada bagian latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Lingkup Geografis Penelitian

Kabupaten Ogan Ilir sebagai lokasi utama penerapan aplikasi SEMESTA.

2. Subjek Penelitian

Pemangku kebijakan seperti Diskominfo, BKPSDM, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan penerapan aplikasi SEMESTA.

3. Topik Penelitian

Implementasi kebijakan *e-government* yang berfokus pada aplikasi SEMESTA.

4. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada tahun 2024, dengan analisis implementasi kebijakan *e-government* khususnya aplikasi SEMESTA.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari Jusal, M. R. (2024). Implementation of E-Government in South Jakarta: A Case Study of Digital Services Through The Digital Application of Polri's Traffic Corps. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(3), 1172–1186. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i3.1123>
- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
- Ahsan, S. C., Samad, M. A., Zuada, L. H., & . N. (2020). Implementation of E-Government Policies: Case Study of Goods and Services Procurement in Buol Regency, Central Sulawesi, Indonesia. *Saudi Journal of Economics and Finance*, 4(6), 276–280. <https://doi.org/10.36348/sjef.2020.v04i06.013>
- Alfatih, A. (2010). *Implementasi dan kebijakan dan pemberdayaan masyarakat*. UNPAD PRESS.
- Alfatih, A. (2014). *Dasar dasar Metodologi Penelitian Sosial*. UPT. Penerbit dan percetakan Universitas Sriwijaya.
- Aos, A., Herawati, A. R., & Warsono, H. (2022). Implementing the e-Kinerja System at the Department of Public Works and Spatial Planning, Cirebon Regency, Indonesia. *Journal of Madani Society*, 1(1), 26–33. <https://doi.org/10.56225/jmsc.v1i1.126>
- Aos, A., Lituhayu, D., & Kismartini, K. (2023). the Implementation Analysis of E-Government Using E-Bpjs Kesehatan in Harjamukti Cirebon: a Case Study. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 17(2), 195–206. <https://doi.org/10.38075/tp.v17i2.377>
- Apleni, A., & Smuts, H. (2020). An e-Government Implementation Framework: A Developing Country Case Study. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 12067 LNCS(April 2020), 15–27. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45002-1_2
- Aprilia, S. N., Kusbandrijo, B., & Rochim, A. I. (2018). *Implementasi E-Government Pada Aplikasi Pds-Pajak Daerah Sidoarjo*. 2(01), 53–54.
- Asogwa, B. E. (2013). Electronic government as a paradigm shift for efficient public services: Opportunities and challenges for Nigerian government. *Library Hi Tech*, 31(1), 141–159. <https://doi.org/10.1108/07378831311303985>
- Bannister, F., & Connolly, R. (2020). The future ain't what it used to be: Forecasting the impact of ICT on the public sphere. *Government Information Quarterly*, 37(1), 101410. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101410>
- Birkland, T. A. (2017). *An introduction to the policy process* (Vol. 01).
- Bryman, A., & Bell, E. (2015). *Business Research Methods*.
- Bygrave, L. A. (2020). *Data Privacy Law: An International Perspective*. Oxford

University Press.

- Cairney, P., & Zahariadis, N. (2016). Multiple streams approach: A flexible metaphor presents an opportunity to operationalize agenda setting processes. *Handbook of Public Policy Agenda Setting*, 87–105. <https://doi.org/10.4337/9781784715922.00014>
- Carter, L., & Bélanger, F. (2005). The utilization of e-government services: Citizen trust, innovation and acceptance factors. *Information Systems Journal*, 15(1), 5–25. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2575.2005.00183.x>
- Collier, R. B. C. (1991). Critical Junctures and Historical Legacies. *The Americas*, 51(1), 145–147. <https://doi.org/10.2307/1008380>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*.
- Dada, D. (2006). E-Readiness for Developing Countries: Moving the focus from the environment to the users. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 27(1), 1–14. <https://doi.org/10.1002/j.1681-4835.2006.tb00183.x>
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2011). Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and e-Government. *Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and e-Government*, 1–304. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199296194.001.0001>
- Fountain, J. (2001). *Building the Virtual State: IT and Institutional Change*.
- Gauld, R., Goldfinch, S., & Horsburgh, S. (2010). Do they want it? Do they use it? The “Demand-Side” of e-Government in Australia and New Zealand. *Government Information Quarterly*, 27(2), 177–186. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2009.12.002>
- Gil-Garcia, R. (2012). Enacting Electronic Government Success: An Integrative Study of Government-wide Websites. In *Organizational Capabilities, and Institutions* (Vol. 82, Issue 2).
- Goggin, M. L., Bowman, A. O., Lester, J. P., & O’Toole, L. J. (1991). Implementation Theory and Practice. *The American Political Science Review*, 85(1), 267–268.
- Greenleaf, G. (2022). Global Data Privacy Laws 2021: 157 National Laws and Still Growing. *Privacy Laws & Business International Report*.
- Haerofiatna, H., & Chaidir, J. (2023). Regional Regulations: Implementation of Electronic-based Government System. *European Journal of Business and Innovation Research*, 11(3), 61–69. <https://doi.org/10.37745/ejbir.2013/vol11n36169>
- Hafel, M., Jamil, J., Umasugi, M., & Anfas, A. (2022). Challenges of E-Government Implementation in The Region Archipelago Characteristics. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 3, 44–58. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v8i1.21282>

- Hanna, N. K. (2010). *Innovation , Technology , and Knowledge Management*.
- Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Heeks, R. (2001). understanding e-Governance for Development. *Institute for Development Policy and Management*, 87–98. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-0318-9.ch005>
- Heeks, R. (2003). i Government Development Projects Fail: *Institute for Development Policy and Management, University of Manchester*, 19.
- Heeks, R. (2006). Understanding and measuring egovernment: international benchmarking studies. *UNDESA Workshop E-Participation and E-Government: Understanding the Present and Creating the Future, Budapest, July*, 27–28.
- Hermawan, K. T., Pusparani, I. G., & Solihudin, D. (2023). Transformasi Digital Layanan Kepegawaian Pemerintah Daerah Kota Cirebon: Studi Kasus Kebijakan Sistem Administrasi Manajemen Pemerintahan (SAMPEAN). *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 13–26. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.13-26>
- Hill, M., & Hupe, P. (2004). Michael Hill and Peter Hupe (2002), *Implementing Public Policy* , Sage Publications, xii + 231 pp., £19.99 pbk, ISBN: 0761966293. *Journal of Social Policy*, 33(1), 154–155. <https://doi.org/10.1017/s0047279403227288>
- Howlett, M. (2018). *Designing Public Policies: Principles and Instruments, Third Edition*. In *Designing Public Policies: Principles and Instruments, Third Edition*. <https://doi.org/10.4324/9781003343431>
- Howlett, M. (2019). Moving policy implementation theory forward: A multiple streams/critical juncture approach. *Public Policy and Administration*, 34(4), 405–430. <https://doi.org/10.1177/0952076718775791>
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying Public Policy Principles and Processes*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.4324/9781315682723-27>
- Irwansyah, & Ardiansyah, M. (2024). *IMPLEMENTASI PROGRAM SISTEM INFORMASI JARINGAN PETERNAKAN DALAM PENDEKATAN E-GOVERNMENT (Studi Kasus Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung) Triwikrama : Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*. 03(06).
- Jenkins-Smith, Ripberger, J. T., Gupta, K., & Silva, C. L. (2014). Cultural Theory and the Measurement of Deep Core Beliefs Within the Advocacy Coalition Framework. *Policy Studies Journal*, 42(4), 509–527. <https://doi.org/10.1111/psj.12074>
- Jenkins-Smith, H. C., & Sabatier, P. A. (1994). *Evaluating the Advocacy Coalition Framework*.

- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. UNG Press Gorontalo.
- Kingdon, J. W. (2014). *Agendas, Alternatives, and Public Policies, Update Edition, with an Epilogue on Health Care*. <http://www.amazon.co.uk/Alternatives-Policies-Epilogue-Classics-Political/dp/020500086X>
- Kingdon, J. W., Policies, P., & Little, B. (1984). *Book Reviews*. 281–283.
- Kotter J.P. (1996). *Leading Change* (Issue 112).
- Kurniadi, H. (2019). Effectiveness of The Implementation of Electronic-Based Government Systems in Order to Improve Public Services (Survey of Sungai Penuh City Government). *Archives of Business Research*, 7(6).
- Kurniati, P. S., Gislawati, R. T., Safitri, F. N., & Lutpi, A. J. (2023). Implementasi Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(4), 875–886.
- Latupeirissa, J. J. P., Dewi, N. L. Y., Prayana, I. K. R., Srikandi, M. B., Ramadiansyah, S. A., & Pramana, I. B. G. A. Y. (2024). Transforming Public Service Delivery: A Comprehensive Review of Digitization Initiatives. *Sustainability (Switzerland)*, 16(7). <https://doi.org/10.3390/su16072818>
- Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional E-government: A four stage model. *Government Information Quarterly*, 18(2), 122–136. [https://doi.org/10.1016/S0740-624X\(01\)00066-1](https://doi.org/10.1016/S0740-624X(01)00066-1)
- Legi, H. V., Rawis, J. A. M., Simanjuntak, S., & Oentoe, F. J. A. (2020). Model Implementasi e-Government di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 3(2), 212–228. <https://doi.org/10.30605/jsgp.3.2.2020.333>
- Lipsky, M. (1983). *Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.
- Luna-Reyes, L. F., & Gil-Garcia, J. R. (2011). Using institutional theory and dynamic simulation to understand complex e-Government phenomena. *Government Information Quarterly*, 28(3), 329–345. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.08.007>
- Matland, R. E. (1995). Synthesizing the implementation literature: The ambiguity-conflict model of policy implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5(2), 145–174. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a037242>
- Matsieli, M., & Sooryamoorthy, R. (2022). Why is Public Policy Implementation Difficult in Developing Countries? Analysis of E-Government Implementation in Lesotho. *Journal of Studies in Social Sciences and Humanities*, 8(3), 303–317. <https://www.researchgate.net/publication/368331243>
- Mintrom, M., & Norman, P. (2009). Policy entrepreneurship and policy change. *Policy Studies Journal*, 37(4), 649–667. <https://doi.org/10.1111/j.1541->

0072.2009.00329.x

- Muhammady, I. G. El, Suryono, A., Rizkika, H. L., & Nawas, R. S. (2022). Policy and Strategy for E-Government Development in Jember District (Implementation of Inpres No. 3 / 2003). *Politico*, 22(2), 99–112. <https://doi.org/10.32528/politico.v22i2.8515>
- Muhtar, E. A., Hermana, D., Gartika, D., & Muharam, R. S. (2019). Policy Implementation: E-village Budgeting in Banyuwangi Regency. *Iapa Proceedings Conference*, 176. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2019.227>
- Nicole Herweg, Nikolaos Zahariadis, R. Z. (2018). *The Multiple Streams Framework: Foundations, Refinements, and Empirical Applications* (4th Editio).
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 8(2), 177–1828. <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>
- Peters, B. G. (2010). *American Public Policy: Promise and Performance*. CQ Press. https://archive.org/details/americanpublicpo00pete_0/mode/2up
- Pressman, & Wildavsky. (1984). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing That Federal Programs Work at All*.
- Rana, N. P., Dwivedi, Y. K., & Williams, M. D. (2019). Evaluating the validity of IS success models for the electronic government research: An empirical test and integrated model. *International Journal of Electronic Government Research*, 9(3), 1–22. <https://doi.org/10.4018/jegr.2013070101>
- Reddick, C. G., & Norris, D. F. (2013). Social media adoption at the American grass roots: Web 2.0 or 1.5? *Government Information Quarterly*, 30(4), 498–507. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.05.011>
- Renja. (2023). *Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatia dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023*.
- Renstra. (n.d.). *Renstra 2021-2026 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir*.
- Robby, U. B., Warsono, H., Dwimawanti, I. H., & Triyuniningsih, T. (2022). E-Government: Online Company Domicile Certificate Service (SKDP) in East Jakarta. *Interdisciplinary Social Studies*, 1(9), 1127–1132. <https://doi.org/10.55324/iss.v1i9.232>
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). Conceptual Framework, The Implementation of Public Policy : A Framework of Analysis, Universitas of California and Pomona College. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538–560. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266>.
- Samsor, A. M. (2021). Challenges and Prospects of e-Government implementation in Afghanistan. *International Trade, Politics and Development*, 5(1), 51–70. <https://doi.org/10.1108/itpd-01-2020-0001>

- Scholl, H. J., & Scholl, M. C. (2014). *Smart Governance: A Roadmap for Research and Practice. 1*. <https://doi.org/10.9776/14060>
- Sombo, A., & Dompok, T. (2023). Implementasi Pelayanan Berbasis Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Batam. *Eco-Buss*, 6(2). <https://doi.org/10.1134/s0514749219040037>
- Taufik, Liwaul, & Sartono. (2023). Analisis Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Konawe Selatan. *Journal Publicuho*, 6(2), 507–524. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.134>
- Thomas R. Dye. (2013). *Understanding Public Policy*. Pearson Prentice Hall.
- Thompson, K. M., & Jaeger, P. T. (2003). *E-Government Around the World: Lessons, Challenges, and Future Directions*.
- UNDP. (1997). *No Title*.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Wahid, F., Furuholt, B., & Kristiansen, S. (2006). Internet for Development? Patterns of use among Internet cafécustomers in Indonesia. *Information Development*, 22(4), 278–291. <https://doi.org/10.1177/0266666906073073>
- Wahyudin, W. (2023). Implementasi E-Office Dalam Peningkatan Pengelolaan Tata Naskah Dinas Di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022. *Jurnal Syntax Fusion*, 3(06), 557–567. <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i06.321>
- Walliman, N. (2011). *Research Methods: The Basics*.
- Wayan, N., Pradnyawati, I., Putu, N., & Widhi, B. (2024). *Implementation of Public Complaint Services in Badung Regency Based on E- Government*. 10(1), 124–133.
- Weible, C. M., & Sabatier, P. A. (2018). Theories of the Policy Process, Fourth Edition. In *Theories of the Policy Process, Fourth Edition*. <https://doi.org/10.4324/9780429494284>
- West, M. A. (2004). *Effective Teamwork Practical Lessons from Organizational Research*. BPS BLACKWELL.
- Widyartama, A. W., Hermeilitha, S., & Asropi. (2024). *Implementation of Electronic Signature Policy in Bogor Regency Government Apparatus*. 7(1), 1–11.
- Wilansari, W., Jumiati, I. E., & Agustino, L. (2022). Implementasi Sistem Infomasi Berbasis Elektronik Melalui SIPD dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 2(1), 121–129. <https://doi.org/10.47134/rapik.v2i1.16>